

Pencegahan *Hoax* Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial

Kombes Pol Chaerul Yani, S.IK, M.H.,
Dir Intelkam Polda Sumatera Selatan
(Alumnus PPRA 59 Lemhannas RI)

Abstrak

Jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 175 juta orang pada tahun 2019, atau sekitar 65,3% dari total 268 juta penduduk. Media sosial telah dieksploitasi untuk penyebarluasan *hoax*, *hate speech* dan sentimen SARA. Penyebarluasan *hoax* melalui media sosial ini cenderung tidak mempertimbangkan dampak harmoni sosial yang ditimbulkan. Penyebarluasan konten negatif seperti *hoax* di media sosial semakin masif karena masyarakat di era *post-truth* lebih mudah menerima sentimen personal seperti agama dan ras, dibandingkan fakta. Mewabahnya *hoax* juga turut dipengaruhi oleh ketidakjelasan regulasi dan efektivitas penegakan hukum, yang membuat pelaku *hoax* sulit dilacak dan dihukum dengan sanksi yang kurang memberikan efek jera. Apalagi penyebarluasan *hoax* menjadi semakin sulit dicegah karena minimnya literasi media di tengah masyarakat Indonesia. Pencegahan *hoax* di media sosial harus berangkat dari perspektif Padnas, dengan diiringi oleh kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. Selain itu segenap komponen bangsa juga harus memiliki keyakinan atas ideologi bangsa dan nasionalisme yang kukuh sehingga terbangun kesamaan pemahaman bahwa penyebarluasan akan dapat merusak harmoni sosial. Pencegahan *hoax* di media sosial menjadi suatu keniscayaan, sebagai wujud dari konsepsi Kewaspadaan Nasional. Hal ini harus dibangun melalui kemampuan untuk mendeteksi bahwa suatu informasi adalah *hoax*, mencegah penyebarluasannya dan memiliki pemahaman bahwa dampak *hoax* di media sosial akan berimplikasi terhadap nasionalisme dan keutuhan bangsa.

Kata kunci: *hoax*, disharmoni sosial, kewaspadaan nasional



Sumber: ruangmahasiswa.com

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah berada dalam suatu era demokrasi dan digitalisasi, yang ditandai oleh kebebasan memilih, berekspresi dan berpendapat seluas-luasnya dengan menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kondisi ini disatu sisi tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat, misalnya dalam konteks kemudahan berinteraksi, berkomunikasi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian di sisi lain, kemajuan TIK tersebut juga menghadirkan implikasi negatif terutama setelah maraknya penggunaan media sosial dan kehadiran perangkat *smart phone*.

Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, penggunaan media sosial di Indonesia seringkali dimanfaatkan oleh sebagian oknum elite demi meraih kepentingan politiknya. Apalagi jumlah pengguna

internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 175 juta orang pada tahun 2019, atau sekitar 65,3% dari total 268 juta penduduk.¹ Kecenderungan ini jelas terlihat dalam momentum tahun politik di Indonesia dewasa ini. Jangkauan audiens dari media sosial yang sangat luas telah dimanfaatkan dalam proses komunikasi politik, sehingga para elite juga semakin gencar menggunakan media sosial untuk kepentingan electoral guna memenangkan kontestasi politik.

Bahkan media sosial telah dieksploitasi untuk penyebarluasan *hoax*, *hate speech* dan sentimen SARA. Penyebarluasan *hoax* melalui media sosial ini cenderung tidak mempertimbangkan dampak harmoni sosial yang ditimbulkan. Maraknya *hoax* di dunia maya ini bahkan dapat menular menjadi konflik ke dunia nyata. Hal inilah yang kemudian menyebabkan peningkatan kegaduhan, karena konflik yang terjadi adalah konflik horizontal di tengah

masyarakat.

Penyebarluasan konten negatif seperti *hoax* di media sosial semakin masif karena masyarakat di era *post-truth* lebih mudah menerima sentimen personal seperti agama dan ras, dibandingkan fakta.² Merujuk pada survei Mastel, diperoleh data bahwa media sosial merupakan sumber utama penyebaran *hoax* dengan 92,4%, dengan konten SARA dan politik menjadi dua konten yang mendominasi selama pemilihan umum.³ Menurut Badan Intelijen Negara, diperkirakan 60% dari konten media sosial adalah *hoax*. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Wiranto, pada tahun 2018 saja terdapat lebih dari 53 kasus *hoax* dan 324 *hate speech* yang masuk di data pemerintah.⁴ Selain itu, sampai 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan terdapat lebih dari 800 ribu situs penyebar *hoax*.⁵

Oleh karena itulah pencegahan *hoax* di media sosial menjadi semakin penting, agar harmoni sosial masyarakat di tengah kemajemukan bangsa dapat tetap terpelihara. Hal ini patut menjadi perhatian karena penyebarluasan *hoax* yang massif dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, menimbulkan kebencian dan bahkan hingga konflik komunal yang disertai kekerasan. Substansi inilah yang akan dibahas lebih lanjut, agar pencegahan *hoax* di media sosial akan dapat mendukung terpeliharanya harmoni sosial.

PEMBAHASAN

Kewaspadaan Nasional dapat dipahami sebagai sikap kesiagaan dan manifestasi kepedulian yang dibangun dari nasionalisme dan kemauan untuk bertanggung jawab

dari setiap elemen masyarakat, sehingga mampu mendeteksi, dan menanggulangi setiap ancaman terhadap kelangsungan kehidupan kebangsaan.⁶ Pemahaman inilah yang harus diaplikasikan melalui pencegahan *hoax*, agar fungsi cegah dini dan deteksi dini terhadap ancaman dari media sosial dapat berjalan optimal.

Perlu dipahami bahwa istilah *hoax* dalam dunia akademik dipopulerkan oleh Curtis Mac Dougall pada 1958, yang mendefinisikan *hoax* adalah ketidakbenaran yang dibuat secara sengaja untuk disamarkan menjadi fakta atau kebenaran.⁷ Definisi ini dibentuk karena *hoax* sejak awal tidak menjadikan faktasebagai basis dan memiliki niat agar non-fakta tersebut diterima menjadi fakta. John Hartley kemudian mendefinisikan beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk mengenal *hoax*. Yang pertama, *hoax* biasanya memiliki karakteristik dari pesan berantai, seperti “*sebarlah ini karena semua orang yang kau tahu atau bencana akan datang.*”⁸ Kedua, *hoax* biasanya tidak mengikut sertakan data kejadian atau insiden tersebut terjadi, atau informasi realistis yang dapat diverifikasi lainnya. Ketiga, informasi *hoax* biasanya tidak mengandung tanggal kadaluarsa. Keempat, biasanya tidak ada organisasi kredibel yang dikutip sebagai sumber informasi atau rujukan biasanya mengarah keorganisasi yang tidak ada hubungannya dengan informasi yang dibagikan.⁹ Keempat karakteristik ini masih relevan dan sering ditemukan, meskipun saat ini *hoax* telah berevolusi sedemikian rupa sehingga bentuk, format dan tampilan dari informasi palsu tersebut sekarang cenderung lebih



canggih dari pada yang diformulasikan Hartley.

Mewabahnya *hoax* juga turut dipengaruhi oleh ketidakjelasan regulasi dan efektivitas penegakan hukum, yang membuat pelaku *hoax* sulit dilacak dan dihukum dengan sanksi yang kurang memberikan efek jera. Apalagi penyebaran *hoax* menjadi semakin sulit dicegah karena minimnya literasi media di tengah masyarakat Indonesia. Tanpa adanya literasi yang memadai, masyarakat tidak akan memiliki kapabilitas untuk melakukan evaluasi, penelitian, akses dan penciptaan terhadap media dan kontennya dengan berbagai wujud, termasuk menciptakan control efektif terhadap media dan kontennya yang digunakan untuk berkomunikasi.¹⁰ Hal ini membuat mereka akan lebih mudah dipengaruhi konten media sosial dalam kehidupannya, tanpa adanya rasionalitas terhadap dampaknya.¹¹ Hal inilah yang menyebabkan konten negative seperti *hoax* dan ujaran kebencian tetap mewabah dalam masyarakat, karena tetap ada sejumlah masyarakat yang secara signifikan tetap mengonsumsinya.

Oleh karena itu, pencegahan *hoax* di media sosial harus berangkat dari perspektif Padnas, dengan diiringi oleh kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. Selain itu segenap komponen bangsa juga harus memiliki keyakinan atas ideologi bangsa dan nasionalisme yang kukuh sehingga terbangun kesamaan pemahaman bahwa penyebaran akan dapat merusak harmoni sosial. Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis mengapa *hoax* dan *fake news* masih saja mewabah di Indonesia. Dua teori yang paling

relevan dalam menjelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meredam *hoax* untuk menjaga harmoni sosial adalah konsep *Confirmation Bias*, *Prospect Theory* dan *Bandwagon Effect*. *Confirmation Bias*, dikemukakan oleh Nickerson yang melihat bahwa individu cenderung untuk mempercayai informasi yang membenarkan kepercayaan atau hipotesa mereka yang telah hadir sebelumnya.¹² *Prospect Theory*, dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky, yang melihat bahwa seseorang membuat keputusan dari informasi lebih berdasarkan nilai yang di dapat, dan terlepas dibandingkan dengan dampak yang akan terjadi.¹³ *Bandwagon effect*, diungkapkan oleh Leibenstein, mengungkapkan bahwa individu melakukan sesuatu dikarenakan orang lain juga melakukannya.

Ketika substansi atau pokok-pokok pikiran konsep Kewaspadaan Nasional diabaikan, maka penyebaran *hoax* di media sosial tentu akan semakin sulit dicegah. Selain itu, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus ditindaklanjuti terkait pencegahan *hoax* di media sosial. Pertama, adalah kurang teredukasinya masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial dan perangkat TIK. Berdasarkan karakter pengguna sosial media yang berkontribusi terhadap penyebaran *hoax*, 54% masyarakat Indonesia mengaku belum bias mendeteksi berita *hoax* dan hanya sekitar 55% di antaranya yang selalu melakukan verifikasi (*fact check*) atas keakuratan informasi yang mereka baca.¹⁴ Apabila merujuk pada konsepsi *confirmation bias* dan *bandwagon effect*, maka dapat terlihat bahwa sebagian masyarakat Indonesia turut menyebarkan *hoax* karena mereka mengira berita itu

benar berdasarkan informasi yang mereka ketahui sebelumnya saja, dan karena orang-orang sekitarnya yang mereka percayai juga menyebarkan informasi tersebut, sehingga mereka juga ikut menyebarkannya.

Kedua, pencegahan *hoax* di media sosial masih kurang optimal karena kurang siaganya segenap elemen bangsa, termasuk aparat, tokoh masyarakat, politisi dan lain-lain, dalam melihat bahaya *hoax*, yang sangat berpotensi dapat menyebabkan bencana sosial. Bahkan para tokoh atau elit tadi turut menjadi pelaku dari pembuat dan penyebarluasan *hoax*. Hal inilah yang dapat menimbulkan bencana sosial, karena harmoni yang terbangun selama ini dapat dirusak karena penyebarluasan *hoax* oleh tokoh-tokoh yang selama ini menjadi panutan.

Ketika masyarakat masih kurang teredukasi dalam bermedia sosial dan elit yang belum memiliki kemauan politik untuk memerangi *hoax*, maka masyarakat dapat terprovokasi dan terjebak dalam suasana saling curiga, kegaduhan sosial dan potensi konflik horizontal. Kondisi inilah yang dapat berdampak terhadap harmoni sosial dalam kehidupan kebangsaan yang sangat beragam. Padahal harmoni sosial dalam pembangunan merupakan salah satu modal utama dalam mempercepat pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, apalagi bangsa Indonesia sangat majemuk baik dari aspek suku, agama, ras dan golongan. Oleh karena itu, pada momentum tahun politik seperti saat ini pencegahan *hoax* di media sosial menjadi semakin diperlukan guna memelihara harmoni sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Pencegahan *hoax* di media sosial menjadi suatu keniscayaan, sebagai wujud dari konsepsi Kewaspadaan Nasional. Hal ini harus dibangun melalui kemampuan untuk mendeteksi bahwa suatu informasi adalah *hoax*, mencegah penyebarluasannya dan memiliki pemahaman bahwa dampak *hoax* di media sosial akan berimplikasi terhadap nasionalisme dan keutuhan bangsa. Dengan demikian, pencegahan *hoax* di media sosial diharapkan akan dapat memelihara harmoni sosial.

Saran

1. Kemenkominfo melakukan sosialisasi terhadap penyedia aplikasi media sosial agar lebih intens dan selektif untuk mencegah penyebarluasan *hoax* melalui aplikasi mereka.
2. Para tokoh dan elit pemimpin bangsa harus dapat menjadi *role model* bagi rakyat atau komunitasnya, dengan menjalankan cara-cara atau metode anti-*hoax* dalam kontestasi politik yang dijalani.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Pokja Lembaga Ketahanan Nasional. *Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2019.
- Eadie, William F. *21st Century Communication: A Reference Handbook*. New York: SAGE Publications, 2009.
- Salam, Aprinus. "The Hoax Phenomenon in Indonesian Society: Observing Anti-Diversity Memes since 2014." *Humaniora*, Vol. 30, No. 3, (2018).
- Sutarso, Jokoet.Al. "Literasi Media Sosial dalam Merangkai Keberagaman dalam Harmoni Budaya Nasional" dalam *Manajemen Image Kebhinekaan Indonesia*. Yogyakarta: BukuLitera, 2017.
- Tyneer, Kathleen. *Literacy in a Digital World: Teaching and Learning in the Age of Information*. New York: Routledge, 2009.
- PratiwiUtami, "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 2, (2018).
- Xinyi Zhou, "Fake News: A Survey of Research, Detection Methods, and Opportunities", *ACM Comput. Surv.* Vol. 1, No. 1, (2018).
- "Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia." *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media (diakses 26 Maret 2019 pukul 19:50)
- "Hasil Survey Mastel tentang Wabah Hoax Nasional." *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf (diakses 26 Maret 2019 pukul 23:28)
- "Wiranto: Ada 53 Kasus Hoax dan 324 Hate Speech Sepanjang 2018". *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/4272642/wiranto-ada-53-kasus-hoax-dan-324-hate-speech-sepanjang-2018>, (diakses 26 Maret 2019 pukul 20:07)

Endotes

- 1 "2019, Pengguna Internet Tembus 175Juta", diakses dari <https://id.beritasatu.com/telecommunication/2019-pengguna-internet-tembus-175-juta/184148>, dikutip pada 26 Maret 2019 pk.22.18
- 2 Joko Sutarso, et.Al "Literasi Media Sosial dalam Merangkai Keberagaman dalam Harmoni Budaya Nasional" dalam *Manajemen Image Kebhinekaan Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2017), hal. 183
- 3 "Hasil Survey Mastel tentang Wabah Hoax Nasional.", *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah Hoax Nasional.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf) (diakses 19 Maret 2019 pukul 16:01)
- 4 "Wiranto: Ada 53 Kasus Hoax dan 324 Hate Speech Sepanjang 2018", *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/4272642/wiranto-ada-53-kasus-hoax-dan-324-hate-speech-sepanjang-2018>, (diakses 19 Maret 2019 pukul 15:47)

- 5 “Ada 800.000 Situs Penyebar *Hoax* di Indonesia”, *Kementerian Komunikasi dan Informatika*, https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media (diakses 19 Maret 2019 pukul 15:50)
- 6 Tim Pokja Lembaga Ketahanan Nasional, *Kewaspadaan Nasional* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, 2019), hal.49-50
- 7 PratiwiUtami, “*Hoax* in Modern Politics: The Meaning of *Hoax* in Indonesian Politics and Democracy”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 2, (2018), hal.88
- 8 Aprinus Salam, “The *Hoax* Phenomenon in Indonesian Society: Observing Anti-Diversity Memes since 2014”, *Humaniora*, Vol. 30, No. 3, (2018),hal.318
- 9 *Ibid.*,
- 10 Kathleen Tyneer, *Literacy in a Digital World: Teaching and Learning in the Age of Information* (New York: Routledge, 2009), hal.118-119
- 11 William F. Eadie, *21st Century Communication: A Reference Handbook* (New York: SAGE Publications, 2009), hal.564
- 12 Xinyi Zhou, “Fake News: A Survey of Research, Detection Methods, and Opportunities”, *ACM Comput. Surv.* Vol. 1, No. 1, (2018), hal.5
- 13 *Ibid.*,
- 14 “Hasil Survey Mastel tentang Wabah *Hoax* Nasional.”, *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf (diakses 26 Maret 2019 pukul 23:28)